SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan;

c. bahwa . . .

c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan;

d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 2 Februari 2014;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Dra. Setiawati

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.

Menyadari kemungkinan adanya pelaku tindak pidana yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Dalam . . .

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ini diatur antara lain mengenai kesepakatan Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, dan penyerahan orang yang diekstradisikan.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6299

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERSATUAN EMIRAT ARAB
MENGENAI
EKSTRADISI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama yang efektif antara kedua negara dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan penghormatan bersama terhadap kedaulatan dan keuntungan bersama;

SESUAI dengan hukum yang berlaku dari Para Pihak.

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1
KEWAJIBAN UNTUK MENGEKSTRADISI

Para Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya, berdasarkan permintaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman

untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

PASAL 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

2. Apabila permintaan ekstradisi berkaitan dengan seseorang yang dicari untuk pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kebebasan yang dikenakan atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, ekstradisi hanya dapat dikabulkan apabila sisa masa hukuman yang dijalani sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

3. Dalam menentukan sebuah tindak pidana dapat dihukum atau tidak berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apabila:

    a. hukum Para Pihak menempatkan tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama.

    b. berdasarkan hukum Para Pihak unsur-unsur dasar tindak pidana tersebut berbeda, dengan pemahaman bahwa keseluruhan tindakan atau pembiaran yang diajukan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.

4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi beberapa tindak pidana yang terpisah yang semuanya dapat dihukum berdasarkan hukum Para Pihak, tetapi beberapa tindak pidana tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Diminta dapat mengabulkan ekstradisi untuk tindak pidana tersebut apabila orang tersebut akan diekstradisi untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

5. Untuk tujuan ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum Para Pihak apabila tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Para Pihak pada saat tindak pidana tersebut dilakukan dan juga pada saat permintaan ekstradisi diterima.

6. Suatu tindak pidana juga dapat diekstradisikan apabila meliputi percobaan atau konspirasi untuk melakukan, berpartisipasi dalam membantu atau bersekongkol dalam pelaksanaan, menganjurkan atau mengadakan, atau menjadi kaki tangan sebelum atau sesudah fakta atas tindak pidana yang dijelaskan pada ayat (1) Pasal ini.

7. Apabila ekstradisi dimintakan atas seseorang yang dicari atas suatu tindak pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengaturan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi tersebut tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai perpajakan, bea cukai, valuta asing yang serupa dengan hukum Pihak Peminta.

PASAL 3
ALASAN WAJIB UNTUK PENOLAKAN

1. Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal sebagai berikut:

   a. Apabila tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana bermuatan politik;

   b. Apabila Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kebangsaan, etnis asli, pendapat politik, jenis kelamin, atau status, yang membuat orang tersebut dirugikan karena alasan tersebut;

   c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak pidana berdasarkan hukum militer, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;

   d. Apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan terhadap orang tersebut di Pihak Diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

   e. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum dari salah satu Pihak, menjadi kebal atas tuntutan dan hukuman atas dasar apapun, termasuk daluarsa atau amnesti;

   f. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, telah atau akan menjadi korban penyiksaan atau kekerasan, tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat di Pihak Peminta;

g. Apabila putusan Pihak Peminta dijatuhkan secara *in absentia,* terpidana tersebut tidak menerima pemberitahuan yang cukup mengenai persidangan atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya dan belum atau tidak akan mendapatkan kesempatan persidangan ulang atas kasusnya dengan kehadiran orang tersebut;

h. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah menjalani hukuman yang berdasarkan hukum dari, atau bagian dari, negara manapun atau telah dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan atau otoritas berwenang, terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lainnya dengan unsur tindakan atau pembiaran yang sama tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.

2. Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak pidana bermuatan politik:
   a. Suatu tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau anggota keluarga inti atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti, atau anggota dari Dewan Tinggi Persatuan Emirat Arab atau keluarga inti;

   b. Suatu tindak pidana yang mewajibkan Para Pihak, menurut konvensi internasional multilateral yang bertujuan untuk mencegah atau memberantas kategori kejahatan tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari, atau mengajukan kasus tanpa penundaan yang tidak wajar kepada otoritas berwenang guna kepentingan penuntutan;

   c. Pembunuhan;

   d. Tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan terorisme; dan

   e. Percobaan, persekongkolan, atau konspirasi untuk melakukan tindak pidana yang dimaksudkan pada huruf a sampai d dari Pasal ini.

3. Apabila terdapat pertanyaan tentang kejahatan yang dilakukan buronan yang dicari adalah tindak pidana bermuatan politik atau tidak, keputusan Pihak Dimintalah yang menentukan.

PASAL 4

ALASAN SUKARELA UNTUK PENOLAKAN

Ekstradisi dapat ditolak dalam hal sebagai berikut:

a. Apabila otoritas berwenang Pihak Diminta telah memutuskan baik untuk tidak mengadakan maupun mengakhiri proses peradilan terhadap orang tersebut terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.

b. Apabila penuntutan terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sedang ditunda di Pihak Diminta terhadap orang yang dimintakan ekstradisi.

c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam hukuman mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, kecuali Pihak tersebut memberikan jaminan sehingga Pihak Diminta menganggap bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan atau, jika dijatuhkan, tidak akan dilaksanakan.

d. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum Pihak Diminta, dianggap telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5

EKSTRADISI WARGA NEGARA

1. Para Pihak memiliki hak untuk menolak mengekstradisikan warga negaranya.

2. Apabila ekstradisi tidak dikabulkan, Pihak Diminta, atas permohonan Pihak Peminta, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas berwenangnya untuk pelaksanaan proses peradilan sesuai hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus menyediakan dokumen dan bukti mengenai kasus tersebut kepada Pihak Diminta. Pihak Peminta wajib diberitahukan mengenai tindakan apapun yang diambil terkait dengan proses peradilan tersebut, berdasarkan permintaannya.

PASAL 6
SALURAN KOMUNIKASI

Untuk tujuan Perjanjian ini, Para Pihak wajib berkomunikasi satu sama lain melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
OTORITAS PUSAT

1. Tiap-tiap Pihak wajib menunjuk Otoritas Pusat untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Tiap-tiap Otoritas Pusat adalah:
   a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
   b. Untuk Pemerintah Persatuan Emirat Arab, Otoritas Pusat adalah Kementerian Kehakiman.

3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

PASAL 8

PERMINTAAN DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Permintaan ekstradisi wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan beserta dokumen terkait melalui saluran diplomatik.

2. Permintaan ekstradisi disertai dengan:

   a. Uraian seakurat mungkin mengenai orang yang dicari, berserta informasi lainnya yang dapat membantu untuk menentukan identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang tersebut, termasuk foto terkini atau sidik jari apabila tersedia;

   b. Keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, tindakan, dan konsekuensi tindak pidana tersebut;

   c. Teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan daluarsa proses peradilan atau daluarsa pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut;

   d. Permintaan penyitaaan, apabila diperlukan.

3. Permintaan ekstradisi yang terkait dengan seseorang yang dicari yang belum pernah disidangkan, selain dokumen yang diperlukan berdasarkan ayat (2) Pasal ini, wajib dilengkapi juga dengan:

   a. Salinan resmi surat perintah penangkapan atau dokumen lain yang memiliki fungsi yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang Pihak Peminta;

   b. Pernyataan di bawah sumpah saksi mengenai pengetahuannya atas tindak pidana tersebut.

4. Permintaan ekstradisi terkait dengan seseorang yang dicari yang telah dipidana atau dihukum oleh Pihak Peminta, selain dokumen yang diperlukan berdasarkan ayat (2) dan (3) Pasal ini, wajib dilengkapi dengan salinan resmi putusan atau pemidanaan, dan:

    a. Apabila orang yang dicari tersebut telah dijatuhi pidana namun belum dihukum, keterangan dari pengadilan yang berwenang terkait dengan putusan tersebut; atau

    b. Apabila orang dicari tersebut telah dihukum, keterangan dari otoritas berwenang yang menyatakan hukuman tersebut dapat dilaksanakan dan sisa hukuman yang harus dijalani.

5. Apabila orang yang dicari telah dijatuhi putusan secara *in absentia*, Pihak Peminta wajib menyerahkan dokumen yang menjelaskan bahwa orang tersebut telah diberitahukan secara patut dan diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pembelaannya di depan pengadilan Pihak Peminta.

6. Surat permintaan resmi ekstradisi dan dokumen terkait lainnya yang diserahkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayat (2), (3), (4), dan (5) wajib secara resmi ditandatangani dan disahkan oleh otoritas berwenang Pihak Peminta dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau dalam bahasa Inggris.

PASAL 9
KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Pihak Diminta menindaklanjuti permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan segera menginformasikan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta melalui saluran diplomatik.

2. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau sebagian permintaan ekstradisi, alasan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

PASAL 10

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pihak Diminta menganggap informasi yang disediakan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup, Pihak tersebut dapat meminta agar informasi tambahan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau dalam waktu sebagaimana disepakati Para Pihak. Apabila Pihak Peminta tidak dapat menyampaikan informasi tambahan dalam jangka waktu tersebut, Pihak Peminta dianggap telah membatalkan permintaannya secara sukarela. Namun, Pihak Peminta tidak dapat dihalangi untuk mengajukan permintaan ekstradisi baru atas orang dan tindak pidana yang sama.

PASAL 11

PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan sementara orang yang dicari sebelum mengajukan permintaan ekstradisi. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, saluran *International Criminal Police Organization,* atau saluran lain yang disetujui oleh tiap-tiap Pihak.

2. Permintaan untuk penahanan sementara wajib memuat informasi yang telah ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 8 Perjanjian ini, keterangan mengenai adanya dokumen yang ditetapkan dalam ayat (3) atau (4) Pasal 8 Perjanjian ini, dan keterangan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dicari tersebut akan segera disusulkan.

3. Pihak Diminta wajib segera memberitahukan Pihak Peminta hasil penanganan permintaan tersebut.

4. Penahanan sementara wajib dihentikan apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penahanan orang yang dicari tersebut, otoritas berwenang Pihak Peminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.

5. Penghentian penahanan sementara sesuai ayat (4) Pasal ini tidak akan mempengaruhi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi selanjutnya terhadap orang yang dicari tersebut apabila Pihak Diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

PASAL 12
PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila terdapat permintaan ekstradisi dari 2 (dua) negara atau lebih terhadap orang yang sama, baik untuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda, guna menentukan negara tempat orang tersebut akan diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan segala faktor yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Permintaan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian atau tidak;
b. Tingkat keseriusan tindak pidana;
c. Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
d. Kewarganegaraan dan kediaman orang yang dicari;
e. Tanggal tiap-tiap Permintaan; dan
f. Kemungkinan ekstradisi dilanjutkan ke negara lain.

PASAL 13
ASAS KEKHUSUSAN

1. Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat diproses di pengadilan, dihukum, ditahan, diekstradisikan kembali ke negara ketiga, atau tunduk pada pembatasan atas kebebasan pribadi lainnya di wilayah Pihak Peminta untuk tindak pidana apapun yang dilakukan selain:

   a. Tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan;

   b. Tindak pidana lain terkait atau yang telah disetujui Pihak Diminta. Persetujuan diberikan apabila tindak pidana yang dimintakan tersebut juga dapat diekstradisikan menurut Perjanjian ini.

2. Permintaan persetujuan dari Pihak Diminta berdasarkan Pasal ini wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 8 Perjanjian ini dan dokumentasi hukum atas keterangan pernyataan yang dibuat oleh orang yang diekstradisikan terkait dengan tindak pidananya.

3. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila orang tersebut telah memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan tidak melakukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembebasannya dari tindak pidana yang membuat orang tersebut diekstradisikan atau apabila orang tersebut secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkannya.

PASAL 14
PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila diminta Pihak Peminta, Pihak Diminta, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, wajib menyita hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya, dan apabila ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.

2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta benda yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal, hilang, melarikan diri, atau alasan lainnya.

3. Pihak Diminta, untuk pelaksanaan proses peradilan pidana yang tertunda, dapat menangguhkan penyerahan harta benda sebagaimana tersebut di atas hingga selesainya proses peradilan tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat Pihak Peminta akan mengembalikannya.

4. Penyerahan harta benda tersebut tidak akan merugikan hak Pihak Diminta atau pihak ketiga atas harta benda tersebut. Apabila terdapat hak tersebut, Pihak Peminta, atas permintaan Pihak Diminta, wajib segera mengembalikan harta benda yang diserahkan dalam keadaan yang sama kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses peradilan.

PASAL 15
PENYERAHAN ORANG YANG DIEKSTRADISIKAN

1. Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya yang terkait dengan

pelaksanaan ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahukan Pihak Peminta jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang akan diekstradisi sebelum penyerahan.

2. Apabila Pihak Peminta belum mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta wajib segera melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan ekstradisi baru oleh Pihak Peminta atas orang tersebut untuk tindak pidana yang sama, kecuali ditentukan lain dalam ayat (3) Pasal ini.

3. Apabila salah satu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati karena alasan di luar kendalinya, Pihak lainnya wajib segera diberitahukan. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal terkait lainnya untuk pelaksanaan ekstradisi. Dalam hal ini, ketentuan ayat (2) Pasal ini akan berlaku.

PASAL 16
PENUNDAAN PENYERAHAN

1. Apabila orang yang dicari sedang menjalani proses peradilan atau sedang menjalani hukuman di Pihak Diminta untuk tindak pidana apapun diluar tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, Pihak Diminta, setelah mengabulkan permintaan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi hingga selesainya proses peradilan dan/atau selesainya masa hukuman.

2. Apabila penundaan ekstradisi dapat menghambat proses peradilan pidana di Pihak Peminta, Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan syarat bahwa proses peradilan pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta akan menyerahkan kembali orang tersebut tanpa syarat dan segera setelah berakhirnya proses peradilan terkait.

PASAL 17
TRANSIT

1. Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisikan seseorang dari negara ketiga melalui wilayah Pihak lainnya, Pihak tersebut wajib meminta izin kepada Pihak lainnya untuk melakukan transit tersebut. Permintaan izin tersebut tidak diperlukan apabila menggunakan transportasi udara dan tidak ada jadwal pendaratan di wilayah Pihak lainnya.

2. Pihak Diminta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, wajib mengabulkan permintaan transit yang diajukan oleh Pihak Peminta.

3. Apabila terdapat pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak lainnya, pelaksanaan transit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1). Pihak lainnya tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang tersebut selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam sementara menunggu permintaan transit.

PASAL 18
BIAYA

1. Semua biaya yang terkait dengan ekstradisi dibebankan kepada Pihak yang wilayahnya merupakan tempat biaya tersebut dikeluarkan.

2. Biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan atau penjemputan orang yang diekstradisi ditanggung Pihak Peminta.

3. Apabila biaya tersebut merupakan biaya yang tidak terduga, Para Pihak wajib berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikannya.

PASAL 19

PENYESUAIAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN

Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari perjanjian internasional lain yang Para Pihak tersebut menjadi pihaknya, atau sebaliknya.

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otoritas Pusat kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

PASAL 21

PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

2. Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan atas tindakan atau pembiaran yang terjadi sebelum dan sesudah Perjanjian ini berlaku.

3. Perjanjian ini dapat diamandemenkan setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang sama sebagaimana dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

4. Tiap-tiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Namun, segala permintaan yang diterima sebelum tanggal penerimaan pemberitahuan untuk pengakhiran perjanjian tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan tersebut dipenuhi.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal dua bulan Februari 2014, dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah adalah otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH	**UNTUK PEMERINTAH**
REPUBLIK INDONESIA	**PERSATUAN EMIRAT ARAB**
DR. AMIR SYAMSUDIN	**DR. HADEF BIN JOA'AN**
MENTERI HUKUM DAN	**AL DHAHIRI**
HAK ASASI MANUSIA	**MENTERI KEHAKIMAN**

REPUBLIK INDONESIA

اتفاقية

بين

جمهورية اندونيسيا

و

الإمارات العربية المتحدة

حول

تسليم المجرمين

حكومة جمهورية اندونيسيا وحكومة الإمارات العربية المتحدة (ويُشار إليهما في ما يلي" بـالطرفين").

رغبة في تعزيز تعاون فعال بين البلدين لمكافحة الجريمة على أساس من الاحترام والمصلحة المشتركة المتبادلة،

وفقاً للقوانين النافذة للطرفين المعنيين ، اتفقا على الآتي :

المـــــادة 1

الالتزام بالتسليم

يوافق كل طرف على تسليم للآخر ، بناء على طلب ومراعاة لأحكام هذه الإتفاقية، أي شخص يوجد في أراضي الطرف المطلوب إليه يكون مطلوبا لدى الطرف الطالب لأي مقاضاة أو محاكمة أو تنفيذ عقوبة في ما يتعلق بجريمة قابلة للتسليم ارتكبت ضمن إختصاص الطرف الطالب.

المـــــادة 2

الجريمة القابلة للتسليم

1. لغرض هذه الاتفاقية تكون الجرائم القابلة للتسليم هي تلك المُعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
2. إذا كان طلب التسليم متعلقا بشخص مطلوب لتنفيذ عقوبة بالسجن أو حرمان آخر من الحرية وقع على جريمة قابلة للتسليم، يمنح التسليم فقط إذا كانت المدة المتبقية لقضاء الحكم ستة (6) أشهر من العقوبة على الأقل.
3. لتقرير ما إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين ، لا يهم ما إذا :

أ. كانت قوانين كلا الطرفين تصنف الأفعال أو الإمتناعات المُشكلة للجريمة ضمن فئة ذات الجريمة أو تسميها بذات المصطلح.

ب. كان اختلاف العناصر المُشكلة للجريمة وفقاً لقوانين كلا الطرفين ، يُفهم منه أن مجموع الأفعال والإمتناعات كما قدمها الطرف الطالب تُشكل جريمة قابلة للتسليم بموجب قوانين الطرف المطلوب إليه.

4. إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يُعاقب كل منها بموجب قوانين كلا الطرفين ولكن بعضها لا يفي بالشروط الأخرى المبينة في البند 1 من هذه المـــــادة، فيجوز للطرف المطلوب إليه منح التسليم عن الجرائم الأخيرة شريطة أن يسلم الشخص عن جريمة واحدة قابلة للتسليم على الأقل.

5. لغرض البند 1 من هذه المـــــادة، تكون الجريمة القابلة للتسليم هي تلك المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين إذا كان الفعل أو الامتناع المُشكل للجريمة يُعد جريمة يمنح من أجلها التسليم بموجب قوانين كلا الطرفين وقت ارتكابها و أيضاً وقت استلام طلب التسليم.

6. تكون الجريمة أيضا قابلة للتسليم إذا تشكلت من شروع أو تواطؤ أو اشتراك في ارتكابها بالمساعدة أو التحريض، المشورة أو تدبير على ارتكابها أو تدخل قبل الفعل أو بعده في جريمة مبينة في البند 1 من هذه المـــــادة.

7. إذا طلب تسليم شخص عن جريمة مخالفة لقانون متعلق بالضريبة ، رسوم جمركية، مراقبة التبادل النقدي أو مسائل إيرادات أخرى ، فلا يجوز رفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب إليه لا يفرض ذات النوع من الضريبة أو الرسم الجمركي أو لا يحتوي على ضريبة أو رسوم جمركية أو نظام تبادل نقدي من ذات النوع كقانون الطرف الطالب.

المـــــادة 3

أسباب إلزامية للرفض

1. لا يُمنح التسليم بموجب هذه الإتفاقية - في أي من الحالات التالية إذا :

أ. عتبر الطرف المطلوب إليه أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طبيعة سياسية.

ب. كان لدى الطرف المطلوب إليه أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قُدم لغرض مقاضاة أو معاقبة الشخص بسبب عرقه، ديانته، جنسيته، أصله العرقي، معتقداته السياسية ، جنسه أو حالته، أو أن وضع ذلك الشخص, يجوز أن يتضرر لأي من تلك الأسباب.

ج. كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة بموجب قانون عسكري وأنها ليست كذلك جريمة بموجب القانون الجنائي العادي.

د. كان هناك حكماً نهائياً قد صدر ضد الشخص في أراضي الطرف المطلوب إليه في ما يتعلق بالجريمة المطلوب من أجلها تسليمه.

ه. تحصن الشخص المطلوب تسليمه بموجب قانون أي طرف ضد المقاضاة أو العقاب لأي سبب بما في ذلك التقادم أو العفو.

و. خضع الشخص المطلوب تسليمه أو قد يخضع في أراضي الطرف الطالب للتعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مُهينه.

ز. صدر حكماً غيابياً لدى الطرف الطالب وأن الشخص المُدان لم يُبلغ على نحو كاف بالمحاكمة أو أنه لم يمنح الفرصة لترتيب دفاعه / دفاعها أو ليست لديه الفرصة في إعادة المحاكمة في حضوره / حضورها.

ح. كان الشخص المطلوب تسليمه قد قضى العقوبة المنصوص عليها قانوناً، أو جزء منها، في أي بلد أو قد تمت تبرئته أو أعفى بواسطة محكمة مختصة أو سلطة في ما يتعلق بتلك الجريمة أو جريمة أخرى قائمة على ذات الأفعال أو الامتناعات المشكلة للجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

2. لغرض هذه الإتفاقية، لا يُعد التالي جريمة ذات طبيعة سياسية :-

أ. جريمة ضد حياة أو شخص أي رئيس دولة أو رئيس حكومة أو عضو في عائلته المباشرة أو أي عضو في المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة أو أي عضو في عائلته المباشرة.

ب. جريمة يكون لكلا الطرفين التزام وفقا لمعاهدة دولية متعددة الأطراف الغرض منها منع أو مكافحة فئة محددة من الجرائم إما بتسليم الشخص المطلوب أو تقديم الدعوى دون تأخير غير ضروري إلى سلطاتها المختصة لغرض المقاضاة.

ج. القـتـــل.

د. الجرائم المتعلقة بأفعال الإرهاب.

ه. أي شروع، تحريض أو مؤامرة لارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البنود الفرعية من (أ) إلى (د) من هذه المادة.

3. يكون قرار الطرف المطلوب إليه حاسما إذا أثير أي سؤال ما إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الشخص جريمة ذات طبيعة سياسية من عدمه.

المـــادة 4

أسباب اختيارية للرفض

لا يجوز منح التسليم في أي من الحالات التالية إذا:

أ. قررت السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه سواء عدم رفع الدعوى أو إنهاء الإجراءات ضد الشخص في الجريمة المطلوب من أجلها التسليم .

ب. لم يفصل في المقاضاة ضد الشخص المطلوب تسليمه بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب إليه.

ج. كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم مُعاقبا عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب ما لم يقدم ذلك الطرف ضماناً يعتبره الطرف المطلوب إليه كافياً أن عقوبة الإعدام لن توقع وإذا وقعت لن تنفذ.

د. اعتبرت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بموجب قانون الطرف المطلوب إليه قد ارتكبت كلياً أو جزئياً ضمن ذلك الطرف.

المـــادة 5

تسليم المواطنين

1. لكل طرف الحق في رفض تسليم مواطنيه.
2. إذا لم يُمنح التسليم ، فعلى الطرف المطلوب إليه بناء على طلب الطرف الطالب تقديم الدعوى إلى سلطته المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات الجنائية وفقاً لقانونه الوطني ،و لهذا الغرض على الطرف الطالب تقديم المستندات والأدلة المتعلقة بالدعوى إلى الطرف المطلوب إليه. يخطر الطرف الطالب بأي إجراء اتخذ في هذا الشأن بناء على طلبه.

المـــادة 6

قـنـــوات الاتصال

لغرض هذه الاتفاقية يتصل الطرفان بعضهما بالبعض عبر القنوات الدبلوماسية.

المـــادة 7

السلطة المركزية

1- يعين كل طرف سلطته المركزية لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية.

2- السلطات المختصة المعنية هي :

أ. بالنسبة لحكومة جمهورية اندونيسيا ، السلطة المركزية هي وزارة القانون و حقوق الإنسان.

ب. بالنسبة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، السلطة المركزية هي وزارة العدل.

3- في حالة تغيير أي طرف لسلطته المركزية ، فعليه إخطار الطرف الآخر خطيا بذلك التغيير عبر القنوات الدبلوماسية.

المـــادة 8

الطلب والمستندات اللازمة

1. يكون طلب التسليم خطياً ويرفق مع المستندات ذات الصلة عبر القنوات الدبلوماسية .
2. يكون طلب التسليم مصحوبا بالآتي :

أ. وصف دقيق – ما أمكن – للشخص المطلوب علاوة على أي معلومات أخرى يجوز أن تساعد في إثبات هوية الشخص، جنسيته ومكانه بما في ذلك صورة ضوئية (فوتوغرافية) حديثة له أو سجلات بصمة أصابعه – إن وجدت -.

ب. بيان موجز بوقائع الدعوى، بما في ذلك زمان ومكان و الفعل ونتائج الجريمة.

ج. نص الأحكام القانونية المحددة للجريمة والعقوبة التي يجوز أن توقع عليها والأحكام القانونية المتعلقة بالتقادم لاتخاذ الإجراءات أو بشأن تنفيذ أي عقوبة عن تلك الجريمة.

د. طلب الضبط - إن كان لازماً - .

3. يرفق مع طلب تسليم الشخص المطلوب الذي لم يحاكم بعد بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب البند 2 من هذه المـــــادة :-

أ. نسخة مصدقة عن أمر القبض أو مستندات أخرى لها ذات الأثر صادرة عن سلطة مختصة لدى الطرف الطالب.

ب. إفادة الشهود المأخوذة على اليمين المتعلقة بعلمهم بالجريمة.

4. يرفق مع طلب التسليم المتعلق بالشخص المطلوب الذي دين أو عوقب لدى الطرف الطالب بالإضافة للمستندات اللازمة بموجب البندين 2 ، 3 من هذه المـــــادة ، نسخة مصدقة عن الإدانة أو العقوبة الموقعة :

أ. إذا دين الشخص المطلوب ولم توقع عليه عقوبة ، بيان بذلك الأثر من المحكمة المختصة .

ب. إذا عوقب الشخص المطلوب ، بيان من السلطة المختصة يشير إلى أن تلك العقوبة نافذة والمدة المتبقي قضاؤها.

5. إذا دين الشخص المطلوب غيابياً، على الطرف الطالب تقديم المستندات التي تفيد بأن ذلك الشخص قد أعلن حسب الأصول ومُنح الفرصة في الحضور وترتيب دفاعه / دفاعها أمام المحكمة لدى الطرف الطالب.

6. يجب أن يُوقع رسمياً أو يُختم طلب التسليم والمستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة من الطرف الطالب وفقاً للبنود 2، 3، 4، ، من سلطة مختصة لدى ذلك الطرف مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب إليه أو إلى اللغة الانجليزية.

المـــــادة 9

التقرير بشأن طلب التسليم

1. يقرر الطرف المطلوب إليه في طلب التسليم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونه الوطني وعليه إخطار الطرف الطالب من غير إبطاء بقراره عبر القنوات الدبلوماسية .

2. إذا رفض الطرف المطلوب إليه طلب التسليم كلياً أو جزئياً، فعليه إخطار الطرف الطالب بأسباب الرفض.

المـــــادة 10

معلومات إضافية

إذا أعتبر الطرف المطلوب إليه أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، يجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية تقدم خلال ثلاثون (30) يوماً، أو مدة يتفق عليها الطرفان إذا عجز الطرف الطالب عن تقديم المعلومات الإضافية خلال تلك المدة يُعد ذلك كتخل عن الطلب طواعية، ومع ذلك لا يُمنع الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد لنفس الشخص وذات الجريمة .

المـــادة 11

القبض الاحتياطي

1. يجوز للطرف الطالب في الحالات العاجلة طلب القبض الاحتياطي على الشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم.يجوز تقديم ذلك الطلب خطياً عبر القنوات المنصوص عليها في المـــادة 6 من هذه الاتفاقية أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية أو قنوات أخرى يتفق عليها الطرفان .
2. يتضمن طلب القبض الاحتياطي المعلومات المشار إليها في البند 2 من المـــادة 8 من هذه الاتفاقية، وبيان يفيد بوجود المستندات المشار إليها في البند 3 أو 4 من المـــادة 8 من هذه الاتفاقية وبيان يفيد بأن طلباً رسمياً لتسليم الشخص المطلوب سيُقدم.
3. على الطرف المطلوب إليه إخطار الطرف الطالب من غير إبطاء بقراره في الطلب.
4. ينهى القبض الاحتياطي إذا لم تتسلم السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه خلال خمسة و أربعون (45) يوماً طلباً رسمياً بالتسليم .
5. لا يخل إنهاء أمر القبض الاحتياطي وفقاً للبند 4 من هذه المادة بإعادة القبض لاحقا و اتخاذ إجراءات تسليم الشخص المطلوب إذا استلم الطرف المطلوب إليه لاحقاً طلباً رسمياً بالتسليم.

المـــادة 12

تداخل الطلبات

إذا استلمت طلبات من دولتين أو أكثر لتسليم نفس الشخص سواء عن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة، لتحديد إلى أي من تلك الدول يُسلم الشخص المطلوب، فعلى الطرف المطلوب إليه اعتبار جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك و ليس حصرا على :

أ. ما إذا كان الطلب قد قُدم بناء على اتفاقية.

ب. خطورة الجرائم.

ج. زمان ومكان ارتكاب الجريمة.

د. جنسية ومكان السكن المعتاد للشخص المطلوب.

ه. التواريخ المعنية بالطلب.

و. إمكانية التسليم اللاحق لدولة أخرى.

المـــادة 13

مبدأ التخصيص

1. لا تُتخذ إجراءات ضد الشخص المطلوب بموجب هذه الاتفاقية أو يعاقب أو يوقف أو يُعاد تسليمه إلى دولة ثالثة أو يخضع لأي قيد على حريته الشخصية في أراضي الطرف الطالب عن أي جريمة ارتُكبت قبل تسليمه باستثناء :

أ. جريمة منح التسليم من أجلها.

ب. أي جريمة أخرى وافق الطرف المطلوب إليه بشأنها . تمنح الموافقة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قابلة للتسليم في حد ذاتها وفقاً لهذه الاتفاقية.

2. يُرفق مع طلب موافقة الطرف المطلوب إليه بموجب هذه المـــادة المستندات المذكورة في البنود 2، 3، 4، 5 من المـــادة 8 من هذه الاتفاقية و محضر قانوني بأي بيان يقدمه الشخص المطلوب تسليمه في ما يتعلق بالجريمة.
3. لا يطبق البند 1 من هذه المـــادة إذا أتيحت للشخص الفرصة في مغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يفعل ذلك خلال ثلاثون (30) يوماً من الإفراج عنه نهائياً في ما يتعلق بالجريمة التي من أجلها سُلم أو إذا عاد الشخص طواعية إلى أراضي الطرف الطالب بعد مغادرته.

المـــادة 14

تسليم الممتلكات

1. على الطرف المطلوب إليه وإلى المدى المسموح به في قانونه الوطني - إذا طلب الطرف الطالب - ضبط عائدات وأدوات الجريمة والممتلكات الأخرى التي يجوز أن تُفيد كأدلة توجد في أراضيه، وعند منح التسليم تسلم هذه الممتلكات إلى الطرف الطالب .
2. عند منح التسليم يجوز أن تسلم الممتلكات المذكورة في البند 1 من هذه المادة حتى وإن لم يُمكن تنفيذ التسليم بسبب موت أو اختفاء أو فرار الشخص المطلوب أو لأي أسباب أخرى .
3. يجوز للطرف المطلوب إليه لاتخاذ أي إجراءات جنائية قيد النظر، تأجيل تسليم الممتلكات المذكورة حتى إنهاء تلك الإجراءات أو تسليمها مؤقتاً شريطة أن يلتزم الطرف الطالب بإعادتها.
4. لا يخل تسليم تلك الممتلكات بأي حق قانوني للطرف المطلوب إليه أو الغير في تلك الممتلكات. إذا وجدت تلك الحقوق فعلى الطرف الطالب بناء على طلب الطرف المطلوب إليه إعادة الممتلكات المسلمة من غير إبطاء و دون مقابل بعد إنتهاء الإجراءات إلى الطرف المطلوب إليه.

المـــادة 15

تسليم الشخص المطلوب

1. إذا وافق الطرف المطلوب إليه على التسليم ، يتفق الطرفان على زمان ومكان التسليم و المسائل الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ التسليم . على الطرف المطلوب إليه إخطار الطرف الطالب بالمدة التي ظل فيها الشخص المطلوب موقوفاً قبل تسليمه .
2. إذا لم يستلم الطرف الطالب الشخص المطلوب خلال ثلاثون (30) يوماً بعد التاريخ المتفق عليه لتنفيذ التسليم, فعلى الطرف المطلوب إليه الإفراج عن ذلك الشخص من غير إبطاء ويجوز رفض طلب جديد من الطرف الطالب بتسليم ذلك الشخص عن ذات الجريمة ما لم ينص على غير ذلك في البند 3 من هذه المـــادة .
3. إذا عجز طرف عن تسليم أو استلام الشخص المطلوب خلال المدة المتفق عليها لأسباب خارجة عن إرادته، يُخطر الطرف الآخر من غير إبطاء، يتفق الطرفان على زمان ومكان جديدين والمسائل ذات الصلة لتنفيذ التسليم في هذه الحالة تطبق أحكام البند 2 من هذه المـــادة.

المـــــادة 16

تأجيل التسليم

1. إذا كانت هناك إجراءات متخذة ضد الشخص المطلوب أو كان يقضي عقوبة في أراضي الطرف المطلوب إليه عن جريمة أخرى غير تلك المطلوب من أجلها التسليم ، يجوز للطرف المطلوب إليه بعد اتخاذ قراره بمنح التسليم تأجيل ذلك حتى انتهاء الإجراءات أو قضاء العقوبة .
2. إذا كان من شأن تأجيل التسليم التأثير على سير الإجراءات الجنائية لدى الطرف الطالب ، يجوز للطرف المطلوب إليه – بناء على طلب – تسليم الشخص المطلوب مؤقتاً إلى الطرف الطالب شريطة أن لا يوقف ذلك الإجراءات الجنائية الجارية وأن يتعهد الطرف الطالب بإعادة ذلك الشخص دون شرط أو قيد ومن غير إبطاء عند انتهاء الإجراءات ذات الصلة .

المـــــادة 17

النقل بالعبور

1. عند تسليم طرف لشخص من دولة ثالثة عبر أراضي طرف آخر فعليه الطلب من الطرف الآخر السماح بالنقل بالعبور ، ولا يكون ذلك الطلب لازماً إذا أستخدم النقل الجوي دون هبوط مجدول في أراضي الطرف الآخر .
2. على الطرف المطلوب إليه بقدر ما لا يتعارض مع قانونه الوطني الموافقة على الطلب بالعبور المقدم من الطرف الطالب .
3. إذا حدث هبوط غير مجدول في أراضي الطرف الآخر، يخضع النقل بالعبور إلى حُكم البند 1 من هذه المادة ويجوز لذلك الطرف بقدر ما لا يتعارض مع قانونه الوطني توقيف الشخص لمدة ثماني وأربعين (48) ساعة انتظاراً لطلب النقل بالعبور.

المـــــادة 18

النفقات

1. جميع النفقات المتعلقة بالتسليم يتحملها الطرف الذي حدثت في أراضيه.
2. يتحمل الطرف الطالب نفقات المواصلات و النقل بالعبور المتعلقة بالتسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه.
3. في حالة ما إذا كانت النفقات المذكورة ذات طبيعة استثنائية، يتشاور الطرفان مع بعضهما البعض لتسوية ذلك.

المادة 19

التوافق مع اتفاقيات أخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق و التزامات الطرفين الناشئة عن اتفاقيات دولية أخرى يكون لكليهما عضوية فيها، أو غير ذلك.

المـــادة 20

تسوية المنازعات

تحل أي منازعة تنشأ عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالقنوات الدبلوماسية إذا لم تتمكن السلطات المركزية من الوصول إلى اتفاق بشأنها.

المـــادة 21

النفاذ و التعديلات والإنهاء

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق و تدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2. تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات سواء ما إذا كان الفعل أو الامتناع المتعلق بذلك قد حدث قبل نفاذ هذه الاتفاقية من عدمه.
3. يجوز تعديل هذه الاتفاقية - في أي وقت - بالموافقة المتبادلة لكلا الطرفين ، و يسري التعديل بذات الإجراء المطبق لنفاذها.
4. يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار خطي للطرف الآخر. يسري الإنهاء بعد الستة (6) أشهر التالية للإخطار، ومع ذلك يظل أي طلب استلم حتى تاريخ استلام إخطار الإنهاء محكوما بهذه الاتفاقية حتى إنهائه.

إشهاداً بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول من حكومتيهما المعنيتين وقعا هذه الاتفاقية.

حُررت من نسختين متطابقتين في أبوظبي هذا اليوم الثاني من شهر فبراير سنة 2014 باللغات الاندونيسية والعربية والإنجليزية ، ولجميع هذه النصوص حجية متساوية. في حالة أي اختلاف في التفسير يسري النص الإنجليزي .

عـن / حكومة الإمـارات العربيـة المتحـدة

د.هادف بن جوعان الظاهري

وزير العدل

عـن / حكومة جمهورية اندونيسيا

د. أمير شمس الدين

وزير العدل وحقوق الإنسان

REPUBLIK INDONESIA

TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE UNITED ARAB EMIRATES
ON
EXTRADITION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as "the Parties");

DESIRING to promote effective cooperation between the two countries in the suppression of crimes on the basis of mutual respect for sovereignty and mutual benefit;

PURSUANT to the prevailing laws of the respective Parties.

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Party agrees to extradite to the other, upon request and subject to the provisions of this Treaty, any person who is found in the territory of the Requested Party and is wanted in Requesting Party for any prosecution or trial or execution of a sentence in respect of an extraditable offence committed within the jurisdiction of the Requesting Party.

ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCE

1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences that are punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment of not less than one year or by a more severe penalty.

2. Where the request for extradition relates to a person who is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment or other deprivation of liberty imposed for an extraditable offence, extradition shall be granted only if a period of at least 6 (six) months of such sentence remains to be served.

3. In determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Parties, it shall not matter whether:

   a. the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology.

   b. under the laws of both Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting Party constitute an extraditable offence under the laws of the Requested Party.

4. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfill the other conditions set out in paragraph 1 of the present Article, the Requested Party may grant extradition for the latter offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

5. For the purpose of paragraph 1 of this Article, an extraditable offence shall be an offence punishable according to the laws of both Parties if the act or omission constituting the offence was an offence for which extradition could be granted under the laws of both Parties at the time it was committed and also the time the request for extradition is received.

6. An offence shall also be an extraditable offence if it consist of an attempt or a conspiracy to commit, participation in the commission of aiding or abetting, counseling or procuring the commission of, or being an accessory before or after the fact to any offence described in paragraph 1 of this Article.

7. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, customs duty or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

ARTICLE 3
MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

1. Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

   a. If the offence for which extradition is requested by the Requested Party as an offence of a political nature;

b. If the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status that person's position may be prejudiced for any of those reasons;

c. If the offence for which extradition is requested is an offence under the military law, which is not also an offence under ordinary criminal law;

d. If there has been a final judgement rendered against the person in the Requested Party in respect of the offence for which the person's extradition is requested;

e. If the person whose extradition is requested has, under the law of either Party, become immune from prosecution or punishment for any reason, including lapse of time or amnesty;

f. If the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the Requesting Party to torture or cruel, inhuman or degrading treatment;

g. If the judgement of the Requesting Party has been rendered *in absentia* the convicted person has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his or her defense and has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his or her presence;

h. If the person whose extradition is requested has undergone the punishment provided by the law of, or a part of, any country or has been acquitted or pardoned by a competent tribunal or authority, in respect of that offence or another offence constituted by the same acts or omissions constituting the offence for which his extradition is requested.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall be deemed not to be an offence of a political nature:

a. an offence against the life or person of any Head of State or a member of his immediate family or any Head of Government or a member of his immediate family, or any member of the United Arab Emirates Supreme Council or any member of their immediate families;

b. an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a multilateral international convention, the purpose of which is to prevent or repress a specific category of offences, to either extradite the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;

c. murder;

d. offences against laws relating to terrorist acts; and

e. any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in sub-paragraphs (a) to (d) of this Article.

3. If any question arises as to whether the offence for which the fugitive is sought is an offence of a political nature, the decision of the Requested Party shall be determinative.

ARTICLE 4

OPTIONAL GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a. If the competent authorities of the Requested Party have decided either not to institute or to terminate proceedings against the person for the offence in respect of which extradition is requested.

b. If a prosecution in respect of the offence for which extradition is requested is pending in the Requested Party against the person whose extradition is requested.

c. If the offence for which extradition is requested carries the death penalty under the law of the Requesting Party, unless that Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out;

d. If the offence for which extradition is requested is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within that Party.

ARTICLE 5
EXTRADITION OF NATIONALS

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.

2. If extradition is not granted, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with documents and evidences relating to the case. The Requesting Party shall be notified of any action taken in this respect, upon its request.

ARTICLE 6
CHANNELS OF COMMUNICATION

For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate with each other through diplomatic channels.

ARTICLE 7
CENTRAL AUTHORITY

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.

2. The respective Central Authorities are:

   a. For the Government of the Republic of Indonesia, the Central Authority is the Ministry of Law and Human Rights; and

   b. For the Government of the United Arab Emirates, the Central Authority is the Ministry of Justice.

3. In case any Party changes its Central Authority, it shall notify in writing the other Party of such change, through diplomatic channels.

ARTICLE 8
THE REQUEST AND THE REQUIRED DOCUMENTS

1. A request for extradition shall be made in writing and conveyed with the related documents through diplomatic channels.

2. A request for extradition shall be accompanied by:

   a. As accurate a description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish that person's identity, nationality and location, including a recent photograph or fingerprint records, where available;

   b. A brief statement of the facts of the offence, including the time, place, conduct and consequences of the offence;

c. The text of the legal provisions determining the offence and the punishment that can be imposed for the offence, and the legal provisions relating to the lapse of time on the institution of proceedings or on the execution of any punishment for that offence;

d. Request for seizure, if it is required.

3. A request for extradition which relates to a person sought who has not yet been tried shall, in addition to the documents required under paragraph 2 of this Article, be accompanied by:

a. A certified copy of an arrest warrant or other documents having the same effect issued by the competent authority of the Requesting Party;

b. Sworn statements of witnesses concerning their knowledge of the offence.

4. A request for extradition which relates to a person sought who has been convicted or sentenced by the Requesting Party shall, in addition to the documents required under paragraph 2 and 3 of this Article, be accompanied by a certified copy of the conviction or sentence, and:

a. If the person sought has been convicted but not sentenced, a statement to that effect by the appropriate court; or

b. If the person sought has been sentenced, a statement by the competent authority indicating that the sentence is enforceable and the extent to which the sentence remains to be served.

5. If the person sought has been convicted *in absentia*, the Requesting Party shall submit such documents describing that person has been duly notified and given the opportunity to appear and arrange for his or her defense before the court of the Requesting Party.

6. The letter of formal request for extradition and other relevant documents submitted by the Requesting Party in accordance with paragraph 2, 3, 4 and 5 shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting Party and be accompanied by translation in the language of the Requested Party or in English language.

ARTICLE 9
DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall deal with the request for extradition in accordance with the procedures provided for by its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision through diplomatic channels.

2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 10
ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient, that Party may request that additional information be furnished within 30 (thirty) days or within a period as agreed between the Parties. If the Requesting Party fails to submit additional information within that period, it shall be considered as having renounced its request voluntarily. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a fresh request for extradition for the same person and offence.

ARTICLE 11
PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, the Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought before making a request for extradition. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 6 of this Treaty, International Criminal Police Organization or other channels agreed to by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in paragraph 2 Article 8 of this Treaty, a statement of the existence of documents indicated in paragraph 3 or 4 of Article 8 of this Treaty and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.

3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of its handling of the request.

4. Provisional arrest shall be terminated if which a period of 45 (forty five) days after the arrest of the person sought, the competent authority of the Requested Party has not received the formal request for extradition.

5. The termination of provisional arrest pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of the person sought if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition.

ARTICLE 12
CONCURRENT REQUESTS

Where requests are received from two or more states for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, for the

purpose of determining to which of those states the person is to be extradited, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

a. Whether the request was made pursuant to a treaty;

b. The gravity of the offences;

c. The time and place of the commission of the offence;

d. The nationality and habitual residence of the person sought;

e. Respective dates of the Requests; and

f. The possibility of subsequent extradition to another state.

ARTICLE 13
RULE OF SPECIALITY

1. A person extradited under the present Treaty shall not be proceeded against, sentenced, detained, re-extradited to a third State, or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the requesting State for any offence committed surrender other than:

   a. An offence for which extradition was granted;
   b. Any other offence in respect or which the Requested Party consents. Consent shall be given if the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the present treaty.

2. A Request for the consent of the Requested Party under the present article shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2, 3, 4 and 5 of Article 8 of this Treaty and a legal record of any statement made by the extradited person with respect to the offence.

3. Paragraph 1 of this Article shall not apply if the person has had an opportunity to leave the Requesting Party and has not done so within 30 (thirty) days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has voluntarily returned to the territory of the Requesting Party after leaving it.

ARTICLE 14
SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instrumentality of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory, and when extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting Party.

2. When the extradition is granted, the property mentioned in paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.

3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered property without change to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 15
SURRENDER OF THE EXTRADITED PERSON

1. If the extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on time, place and other relevant matters relating to the execution of the extradition. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person to be extradited has been detained prior to the surrender.

2. If the Requesting Party has not taken over the person to be extradited within 30 (thirty) days after the date agreed for the execution of the extradition, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse a fresh request by the Requesting Party for extradition of that person for the same offence, unless otherwise provided for in Paragraph 3 of this Article.

3. If a Party fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

ARTICLE 16
POSTPONEMENT OF SURRENDER

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for any offence other that for which the extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings and/or the completion of the sentence.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 17
TRANSIT

1. When a Party is to extradite a person from a third state through the territory of the other Party, it shall request the other Party for the permission of such transit. No such request is required where air transportation is used and no landing in the territory of the other Party is scheduled.

2. The Requested Party shall, in so far as not contrary to its national law, grant the request for transit made by the Requesting Party.

3. If an unscheduled landing in the territory of the other Party occurred, transit shall be subjected to the provision of Paragraph 1. That Party may, insofar as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 48 (forty eight) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 18
EXPENSES

1. All expenses related to the extradition shall be borne by the Party in which territory they were incurred.

2. The expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

3. In case the said expenses are of an extraordinary nature, the Parties shall consult with each other to settle the same.

ARTICLE 19
COMPATIBILITY WITH OTHER TREATIES

This Treaty shall not affect any rights and obligations of the Parties that arise from other international treaties in which they are both parties, or otherwise.

ARTICLE 20
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are unable to reach agreement.

ARTICLE 21
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS, AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of the instruments of ratification.

2. This Treaty shall apply to requests whether or not the relevant act or omission occurred prior to the Treaty entering into force.

3. This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties, such amendments shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

4. Either Party may terminate this Treaty at any time upon a written notice to the other Party. Termination shall take effect 6 (six) months following the notification. However, any request received up to the date of receipt of the notice to terminate shall continue to be governed by this Treaty until the request is concluded.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Abu Dhabi on this second day of February, 2014, in Indonesian, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
DR. AMIR SYAMSUDIN	**DR. HADEF BIN JOA'AN AL DHAHIRI**
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS	**MINISTER OF JUSTICE**

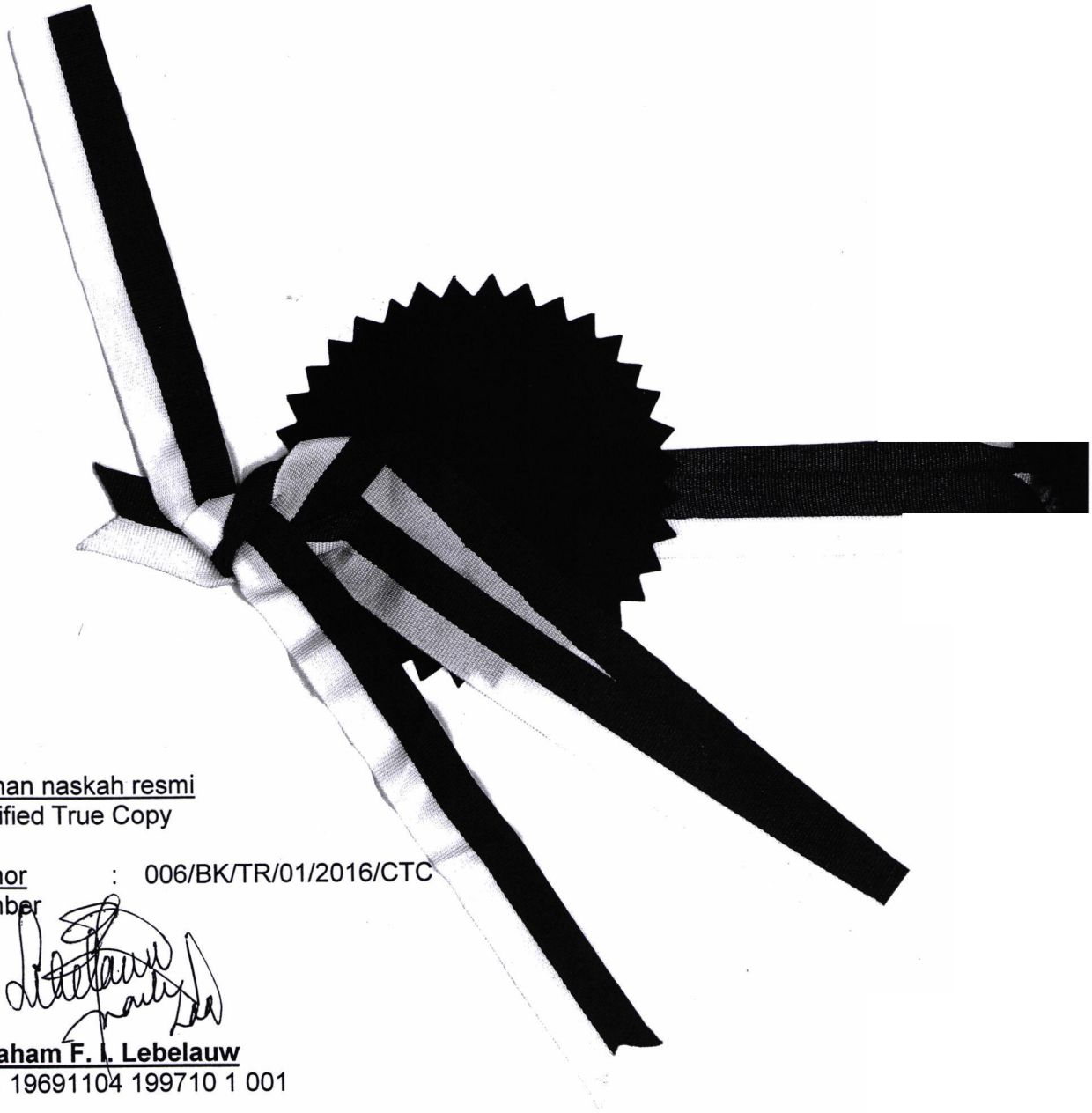

Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 006/BK/TR/01/2016/CTC
Number

Abraham F. I. Lebelauw
NIP. 19691104 199710 1 001

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Januari 2016
Date